



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 sebelum dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka penyesuaian alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembantuan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9);

27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 8);

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
2. Lampiran II pada kode rekening belanja, program dan kegiatan pada :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang; dan
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang;diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 11

1
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA PERWAL APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.159.409.774.000	2.159.409.774.000	0	0
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.438.081.250.000	1.438.081.250.000	0	0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	269.702.349.000	269.702.349.000	0	0
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	41.066.960.000	41.066.960.000	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	410.559.215.000	410.559.215.000	0	0
1.2	Dana Perimbangan	1.800.267.767.000	1.800.267.767.000	0	0
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	172.451.167.000	172.451.167.000	0	0
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.288.423.920.000	1.288.423.920.000	0	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.392.680.000	339.392.680.000	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	789.571.539.000	805.041.539.000	15.470.000.000	1,96
1.3.1	Pendapatan Hibah	120.420.375.000	120.420.375.000	0	0
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	585.707.338.000	585.707.338.000	0	0
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	15.470.000.000	15.470.000.000	100
1.3.4	Dana Insentif Daerah	83.443.826.000	83.443.826.000	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.749.249.080.000	4.764.719.080.000	15.470.000.000	0,33
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.828.438.699.000	1.828.438.699.000	0	0
2.1.1	Belanja Pegawai	1.728.042.731.000	1.728.042.731.000	0	0
2.1.2	Belanja Hibah	69.795.460.000	69.795.460.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	23.372.000.000	23.372.000.000	0	0
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	2.228.508.000	2.228.508.000	0	0
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
2.2	Belanja Langsung	3.305.989.075.000	3.321.459.075.000	15.470.000.000	0,47
2.2.1	Belanja Pegawai	132.214.754.900	132.276.144.900	61.390.000	0,05
2.2.2	Belanja Barang Jasa	1.958.547.288.161	1.959.705.898.161	1.158.610.000	0,06
2.2.3	Belanja Modal	1.215.227.031.939	1.229.477.031.939	14.250.000.000	1,17
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.134.427.774.000	5.149.897.774.000	15.470.000.000	0,30
	Surplus / Defisit Belanja Daerah	(385.178.694.000)	(385.178.694.000)	0	0
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	399.178.694.000	399.178.694.000	0	0

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4-3	6
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
3.2.3	Dana Bergulir	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	385.178.694.000	385.178.694.000	0	0
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
1		DINAS PEKERJAAN UMUM			DINAS PEKERJAAN UMUM				
		1.1.03.1.1.03.01.41.003	Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)	11.000.000.000	1.1.03.1.1.03.01.41.003	Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)	16.000.000.000	5.000.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	11.000.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	16.000.000.000	5.000.000.000	
		5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	11.000.000.000	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	16.000.000.000	5.000.000.000	
		5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	11.000.000.000	5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	16.000.000.000	5.000.000.000	
		1.1.03.1.1.03.01.41.005	Pengembangan Wilayah BWK III (Barat - Utara)	15.000.000.000	1.1.03.1.1.03.01.41.005	Pengembangan Wilayah BWK III (Barat - Utara)	22.000.000.000	7.000.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	22.000.000.000	7.000.000.000	
		5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15.000.000.000	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22.000.000.000	7.000.000.000	
		5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	15.000.000.000	5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	22.000.000.000	7.000.000.000	
Jumlah Per OPD				26.000.000.000			38.000.000.000	12.000.000.000	

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
2		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		1.1.04.1.1.04.01.16.373	Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman	17.000.000.000	1.1.04.1.1.04.01.16.373	Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana Lingkungan Permukiman	19.250.000.000	2.250.000.000	
		5.2.3	BELANJA MODAL	17.000.000.000	5.2.3	BELANJA MODAL	19.250.000.000	2.250.000.000	
		5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.250.000.000	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.250.000.000	0	
		5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000	0	
		5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	1.050.000.000	5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	1.050.000.000	0	
		5.2.3.42	Belanja Modal DED	200.000.000	5.2.3.42	Belanja Modal DED	200.000.000	0	
		5.2.3.42.01	Belanja Modal DED Perencanaan	200.000.000	5.2.3.42.01	Belanja Modal DED Perencanaan	200.000.000	0	
		5.2.3.44	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.550.000.000	5.2.3.44	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.800.000.000	2.250.000.000	
		5.2.3.44.01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.550.000.000	5.2.3.44.01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	17.800.000.000	2.250.000.000	
		Jumlah Per OPD		17.000.000.000			19.250.000.000	2.250.000.000	

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
3		BAPPEDA KOTA SEMARANG			BAPPEDA KOTA SEMARANG				
		3.1.01.3.1.01.01.19.040	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	0	3.1.01.3.1.01.01.19.040	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	545.000.000	545.000.000	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.130.000	72.130.000	
		5.2.1.01	Honorarium PNS	0	5.2.1.01	Honorarium PNS	72.130.000	72.130.000	
		5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.950.000	69.950.000	
		5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	500.000	
		5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	0	5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	
		5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	0	5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	680.000	680.000	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	472.870.000	472.870.000	
		5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.600.000	5.600.000	
		5.2.2.02.12	Belanja bahan laboratorium	0	5.2.2.02.12	Belanja bahan laboratorium	5.600.000	5.600.000	
		5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.675.000	33.675.000	
		5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.200.000	3.200.000	
		5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.300.000	21.300.000	
		5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	0	5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.175.000	9.175.000	
		5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	104.700.000	104.700.000	
		5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.700.000	104.700.000	
		5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136.995.000	136.995.000	
		5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.720.000	108.720.000	
		5.2.2.15.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	0	5.2.2.15.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	8.625.000	8.625.000	
		5.2.2.15.05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	0	5.2.2.15.05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	19.650.000	19.650.000	
		5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	165.000.000	165.000.000	
		5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	165.000.000	165.000.000	

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
		5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.000.000	14.000.000	
		5.2.2.47.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	0	5.2.2.47.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	14.000.000	14.000.000	
		5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	5.2.2.48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.900.000	12.900.000	
		5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	5.2.2.48.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.900.000	12.900.000	
Jumlah Per OPD				0			545.000.000	545.000.000	

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
4		SEKRETARIAT DAERAH			SEKRETARIAT DAERAH				
		3.1.05.3.1.05.03.30.004	Penunngangan TNI Manunggal Membangun Desa	350.000.000	3.1.05.3.1.05.03.30.004	Penunngangan TNI Manunggal Membangun Desa	1.025.000.000	675.000.000	
		5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.970.000	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.970.000	0	
		5.2.1.01	Honorarium PNS	11.970.000	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.970.000	0	
		5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000	0	
		5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	5.500.000	5.2.1.01.05	Honorarium PPTK	5.500.000	0	
		5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	4.070.000	5.2.1.01.06	Honorarium Bendahara	4.070.000	0	
		5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	338.030.000	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.013.030.000	675.000.000	
		5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.650.000	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.650.000	0	
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	0	
		5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.200.000	5.2.2.01.11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.200.000	0	
		5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	204.000.000	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	624.000.000	420.000.000	
		5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	204.000.000	5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	624.000.000	420.000.000	
		5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000	0	
		5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	0	
		5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.000	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.580.000	0	
		5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.555.000	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.555.000	0	
		5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	25.000	5.2.2.06.03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	25.000	0	
		5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000	0	
		5.2.2.07.07	Belanja sewa panggung	4.500.000	5.2.2.07.07	Belanja sewa panggung	4.500.000	0	
		5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	15.000.000	5.2.2.07.08	Belanja sewa sound system	15.000.000	0	
		5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.500.000	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	64.500.000	15.000.000	
		5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	18.000.000	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	24.000.000	6.000.000	
		5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	24.000.000	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	33.000.000	9.000.000	

Sebelum Perubahan					SesudahPerubahan				
No	Hal. Buku Penjabaran APBD 2019	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	SKPD/Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Selisih	Ket
		5.2.2.10.11	Belanja sewa tanaman	3.000.000	5.2.2.10.11	Belanja sewa tanaman	3.000.000	0	
		5.2.2.10.13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	4.500.000	5.2.2.10.13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	4.500.000	0	
		5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	255.000.000	240.000.000	
		5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	15.000.000	5.2.2.21.05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	255.000.000	240.000.000	
		5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	18.000.000	5.2.2.47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	18.000.000	0	
		5.2.2.47.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	18.000.000	5.2.2.47.02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	18.000.000	0	
Jumlah Per OPD				350.000.000			1.025.000.000	675.000.000	
JUMLAH TOTAL				43.350.000.000			58.820.000.000	15.470.000.000	

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI